

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, sehingga bisa dikatakan kalau tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi.¹ Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang ingin dicapai manusia adalah terpenuhinya tujuan hidup dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.²

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. Pada awalnya, lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan nonbank semakin berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 2.

² Ibid.

hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³

Keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan oleh Pemerintah Indonesia dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan usahanya dan keluarga miskin dalam mengurangi kerentanan hidup (terhadap musibah dan permasalahan ekonomi), serta untuk meningkatkan penghasilan mereka.

Keuangan mikro adalah alat yang penting dalam strategi pembangunan negara yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium. Walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam penyedia jasa keuangan mikro, namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro masih tetap ada. Sebagian besar keluarga di Indonesia tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, dimana sebagian besar keluarga ini tinggal di wilayah pedesaan dan di luar wilayah Jawa dan Bali yang jumlah masyarakat miskinnya tercatat paling tinggi. Permasalahan rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan mikro disebabkan oleh adanya kerangka hukum keuangan mikro yang masih terbatas, kurang memadainya peraturan dan pengawasan, serta masih diterapkannya paradigma lama dalam

³ Nur Dianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 79.

bentuk kredit bersubsidi dengan target sasaran tertentu yang berjalan bersamaan dengan penerapan paradigma baru yaitu paradigma lembaga keuangan mikro yang dikembangkan secara komersial dan berorientasi pasar.

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu persoalan mendasar terutama Negara berkembang yakni Indonesia. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 28,59 juta atau 11.66% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2011 sebesar 30,01 juta orang atau 15,72% (BPS, 2012). Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Pada tahun 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 1,52 menurun menjadi 1,38 sementara di daerah pedesaan tahun 2011 sebesar 2,63 menjadi 2,42 ditahun 2012. Indeks Keparahan Kemiskinan untuk tahun 2012 diperkotaan hanya 0,36 sementara di daerah pedesaan mencapai 0,61 (BPS, 2012). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada daerah perkotaan dan sebagian besar terjadi pada petani. Struktur perekonomian Indonesia sedang bergeser ke arah industrialisasi, namun peranan sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah, diantaranya adalah strategis. Dari sisi strategis, kontribusi PDB dan serapan tenaga kerja pada sektor ini semenjak krisis ekonomi tahun 1998 sampai sekarang 2013 masih tetap berperanan penting.⁴

Terkait dengan usaha di bidang pertanian, salah satu upaya yang ditempuh untuk mendukungnya adalah melalui pendirian Lembaga Keuangan

⁴ Wibowo, Hendro Hayati, Nur, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/3833>, 23 Maret 2013, diakses tanggal 23 Maret 2015.

Mikro Agribisnis (LKM-A). Stempel agribisnis menjadi ciri dari LKM yang mengkhususkan dalam mendukung usaha di bidang pertanian. LKM-A, dikembangkan sebagai kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha agribisnis skala kecil di pedesaan, baik berbentuk formal maupun non formal.⁵

Pemerintah berpandangan bahwa pembangunan agribisnis merupakan upaya sistemik yang dianggap ampuh untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain : a.) menarik dan mendorong sektor pertanian, b.) menciptakan sektor perekonomian yang tangguh, c.) menciptakan nilai tambah, d.) meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja dan e.) memperbaiki pembagian pendapatan.⁶ Data menunjukkan bahwa kontribusi sistem agribisnis dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 48%, dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 77%, dan dalam total ekspor menyumbang 50% atau hampir 80% dari ekspor nonmigas.⁷

Kinerja sektor agribisnis belum menunjukkan performa yang optimal. Hal ini dirasakan oleh beberapa para petani yang menjadi subjek dari rangkaian usaha agribisnis. Performa perusahaan agribisnis yang berkembang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi taraf hidup para petani. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terdapat dalam sistem agribisnis. Permasalahan yang terdapat dalam sistem agribisnis yakni permasalahan internal diantaranya kelemahan dalam struktur permodalan dan kurangnya

⁵ Rachmat Hendayana, <http://lembagakeuanganmikroagribisnis.blogspot.com/>, 23 January 2011, diakses tanggal 24 Maret 2015.

⁶ Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 154.

⁷ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 16.

akses petani terhadap lembaga keuangan. Lemahnya akses petani ke lembaga keuangan terutama akibat dari kegagalan dalam memenuhi persyaratan pendanaan dari perbankan. Selama ini, usaha di sektor agribisnis khususnya dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah kurang mendapat perhatian dari dunia perbankan karena dunia perbankan menganggap sektor pertanian kurang memberikan keuntungan bagi perbankan, disamping adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sektor pertanian. Padahal jika diperhatikan, sektor pertanian terbukti mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional.

Berkaitan dengan masalah terbatasnya modal, kelompok usaha tani membutuhkan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan penuh di sektor agribisnis. Melihat situasi dan kondisi ini, suatu Desa di Kabupaten Nganjuk sepakat membuat lembaga yang mendukung penuh di sektor pertanian. Usaha ini berbentuk koperasi masyarakat Desa, khususnya kelompok tani/gapoktan. Berawal dari situlah koperasi gapoktan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri.

Achmad Sulkan selaku ketua GAPOKTAN(Gabungan Kelompok Tani) Mulya Jaya menuturkan "hasil pertanian pada tahun 2008 sebelum adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri hanya bisa menanam tanaman yang umumnya ditanam, yaitu padi dan jagung. Setelah adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri tahun 2010 tanaman yang ditanam sudah bervariasi, yaitu jagung, padi, kedelai, kacang dan bawang

merah”.⁸ Berdasarkan hasil di atas peneliti menyimpulkan bahwa setelah adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri adanya peningkatan produktivitas yang dialami para petani. Produktivitas merupakan permasalahan utama dalam pertanian yang harus diselesaikan. Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang.

Terkait pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti **“PERANAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AMANAH MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS GABUNGAN KELOMPOK TANI DESA SEKARPUTIH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri dalam meningkatkan produktivitas gabungan kelompok tani?
2. Bagaimana peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri dalam meningkatkan produktivitas gabungan kelompok tani Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?

⁸ Achmad Sulkan, Ketua GAPOKTAN Mulya Jaya, Nganjuk, 21 April 2015.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul proposal skripsi, maka disusun tujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri dalam meningkatkan produktivitas gabungan kelompok tani.
2. Bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri dalam meningkatkan produktivitas gabungan kelompok tani Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang judul skripsi, fokus penelitian dan tujuan studi diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Toeritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan khazanah keilmuan di bidang perekonomian syari'ah dan perkoperasian pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri

Dengan penelitian ini di harapkan khususnya bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Mandiri sebagai referensi untuk mengembangkan Koperasi menuju yang lebih baik lagi.

b. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dapat menambah pengetahuan di bidang koperasi syariah.